

**Implementasi Kebijakan Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir  
(Studi di Kec. Pulau Batang dua di Kota Ternate)**

**Kristofel Puse<sup>1</sup>  
Sarah Sambiran<sup>2</sup>  
Ventje Kasenda<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir. Pemanfaatan sumber daya pesisir di satu sisi berdampak pada kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan penyediaan lapangan pekerjaan seperti penangkapan ikan secara tradisional, budidaya tambak, penambangan terumbu karang dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain pemanfaatan sumber daya alam secara terus menerus dan berlebihan akan menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan ekosistem pesisir. Wilayah pesisir memiliki potensi lain berupa keunikan dan keindahan alam yang dapat menjadi daya tarik wisata sehingga aktivitas pariwisata pun dapat dikembangkan dan menghasilkan dampak positif dengan ikut meningkatkan perekonomian kawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitain kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar pelaksana kebijakan pengembangan Wilayah Pesisir tidak berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dari adanya keterlambatan dalam musuawaran rencana pembangunan di tahun 2020. Namun karena adanya pandemi Covid-19 maka pengaggaran itu tidak dilakukan.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengembangan, Wilayah Pesisir**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Pengembangan pariwisata pesisir sendiri pada dasarnya difokuskan pada pemandangan, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya dan karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Reaksi atas pengembangan pariwisata ini dapat berupa implikasi negatif berupa terdegradasinya lingkungan akibat eksploitasi sumber daya untuk aktivitas pariwisata, sehingga diperlukan pengelolaan dan pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan yang memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan (hidup) generasi penerus di waktu yang akan datang. Pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan juga dapat memberikan implikasi positif bagi kelestarian lingkungan pesisir.

Dalam kebijakan hal yang paling penting adalah kesesuaian pendekatannya dengan kebijakan itu sendiri, baik kebijakan itu yang bersifat *top-downer* atau kebijakan yang bersifat *bottom-upper* Leo Agustino.(2014:24). Dalam memilih pendekatan hukum, hal ini dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, ada masyarakat yang memang terpaksa taat akan hukum, dan ada juga masyarakat yang tidak suka dikatakan sebagai orang yang melanggar hukum, sehingga akan selalu taat akan kebijakan; adanya kepentingan publik, hal ini dilihat dari keyakinan masyarakat bahwa kebijakan public dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat publik yang berwenang dan sesuai dengan aturan maka masyarakat akan mau melaksanakan kebijakan, terlebih lagi ketika kebijakan publik memang

berhubungan erat dengan hajat hidup mereka; adanya kepentingan pribadi, hal ini dilihat dari kepehaman masyarakat yang terkadang sering mendapatkan keuntungan dari implementasi kebijakan, maka dengan senang mereka akan menerima dan mendukung serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dan masalah waktu, hal ini dilihat dari berjalannya kebijakan itu dengan waktu yang ada, pada awalnya kebijakan mungkin ditolak dan kontroversi namun semakin lama waktu berjalan maka kebijakan tersebut akan diterima.

Kebijakan pengembangan pesisir dan lautan sebagai kebijakan strategis diharapkan dapat membawa kemakmuran rakyat, mengembangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia serta mampu mensejajarkan diri dengan komunitas negara maju didunia. Kebijakan tersebut didasarkan pada obyektivitas ilmiah

1. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan.
2. Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan.
3. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan.

Dari beberapa tujuan tersebut di atas maka pemanfaatan secara optimal dan lestari adalah salah satu yang menjadi pertimbangan utama di dalam pengelolaan sumber daya. Pemanfaatan secara lestari hanya akan dicapai jika sumber daya dikelola secara baik, proporsional dan transparan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya

manusia, alam, buatan dan sosial (Keraf, 2000). Pengembangan dan pengelolaan daerah pesisir di Indonesia bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah pusat tetapi kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Sementara faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Kebijakan, faktor ini yaitu adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada, di Kecamatan Pulau Batang Dua di Kota Ternate yang ingin dicapai adalah sebuah deskripsi eksploratif yang konstruktif bagi pemerintah sebagai aktor *decision maker* mampu memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan penolakan kebijakan sehingga kedepan kebijakan akan lebih optimal. Implementasi Kebijakan pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Pulau Batang dua Kota Ternate. Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil seiring dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Hasil dari pengamatan di lapangan yang di lakukan di Kecamatan Pulau Batang Dua di Kota Ternate. Masyarakat Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate, membutuhkan talud penahan ombak. Salah satu masyarakat Kecamatan batang Dua, mengatakan, masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibagian terluar di Kota Ternate, seperti Batang dua, butuh pembangunan talud penahan ombak, untuk melindungi permukiman pantai dari abrasi yang menguatirkan. Kata dia abrasi sudah semakin dekat dengan permukiman masyarakat. Kalau tidak ditangani dengan pembangunan talud penahan ombak, maka suatu saat permukiman akan hilang. Masyarakat sudah melakukan berbagai upaya untuk

meredam abrasi itu, seperti menumpuk batu di bibir pantai, termasuk tidak mengambil pasir pantai untuk kebutuhan bahan bangunan, tapi semuanya tidak membuahkan hasil karena kerasnya ombak setiap hari, Menurut masyarakat sudah berulang kali mengusulkan pembangunan talud penahan ombak kepada DPRD maupun Pemerintah Kota Ternate yang berkunjung, namun usulan itu belum mendapat perhatian serius bahkan di Musrenbang juga telah diusulkan beberapa kali. Oleh karena itu, sebagai Pemerintah Kota Ternate menaruh perhatian serius terhadap daerah-daerah terluar seperti Batang Dua.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong. (2011:54) Metode Deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. Lexy J. Moleong. (2011:54).

Informan dalam penelitian ini adalah

1. Camat
2. Kepala Subag Umum Dan Kepegawaian
3. Tokoh Pemudah 1 orang
4. Masyarakat Kecamatan Pulau Batang Dua (3 Orang)

Adapun fokus penelitian ini menggunakan teori dari Pengertian Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka Edwards III, George C. Subarsono, AG. (2005:23) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

- 1) Komunikasi  
Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).
- 2) Sumber Daya  
Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.
- 3) Disposisi  
Ketiga, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik,

maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

- 4) Struktur Birokrasi  
Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Dalam pengumpulan data lapangan, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara
2. Daftar Wawancara
3. Dokumentasi

#### **Hasil Peneitian**

##### **1. Comunication (Komunikasi)**

Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal

tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebagian besar informan mengemukakan pendapatnya bahwa koordinasi antar pelaksana kebijakan pengembangan Wilayah Pesisir tidak berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dari adanya keterlambatan dalam musuawaran rencana pembangunan di tahun 2020. Namun karena adanya pandemi Covid-19 maka pengaggaran itu tidak dilakukan.

Arah kebijakan pemerintah di masa lalu yang memprioritaskan pembangun talud penahan ombak, menyebabkan masyarakat pesisir kurang di perhatikan. Arah kebijakan ini seharusnya adalah memberikan perhatian yang sama pada masyarakat pesisir dengan cara memberdayakan masyarakat pesisir tentang pemahaman sadar lingkungan dengan menggugah kesadaran dan pola berpikir kritis tentang kondisi ekosistem yang ada di sekitarnya.

## 2. Resources (Sumber Daya)

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sumber daya peralatan merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, menurut Edward III yaitu:

“Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”.

Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat di percaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Dari hasil wawancara di beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar kebijakan dalam pembuatan atau perumusan kebijakan ini sangat perlu memperhatikan Undang-undang yang ada maupun aturan dari pemerintah daerah dan tentunya selalu memperhatikan kondisi di daerah atau perairan sendiri yang begitu banyak potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan untuk diproduksi khususnya sektor perikanan serta melihat penduduk yang cenderung lebih banyak masyarakat nelayan. Selain itu tolak ukur yang dilihat dalam perumusan kebijakan ini adalah agar masyarakat bisa terlindungi dari abrasi dan diberdayakan dengan baik. Hal ini terlihat. Pembuatan kebijakan itu pula tidak terlepas dari acuan misi dari Pemerintah Daerah. Tetapi terlepas dari hal itu, tentunya setiap hal ingin disempurnakan pastinya mempunyai titik kendala tetapi kembali pemerintah itu sendiri bagaimana bertindak dalam mengatasi kendala tersebut.

### **3. Disposition (Disposisi)**

Disposition adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Menurut Winarno, Budi. (2010:42) terdapat tiga macam elemen yang mempengaruhi disposisi yaitu pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), intensitas terhadap kebijakan”.

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

Dari hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa titik fokus pada konflik yang terjadi dari segi pembangun talud menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan ada saja kendala yang terjadi dalam pengimplementasiannya seperti terjadinya pembuatan talud. Hal ini dapat dilihat ketika ada masyarakat yang terjadi kesalahpahaman antara pemerintah terkait baik dari pembangunan talud selaku pelaksana maupun dari masyarakat itu sendiri yang dapat menimbulkan konflik yang ringan diantaranya. Namun peran pemerintah sendiri selalu bisa mengatasi kendala-kendala kecil seperti itu. Dalam arti lain bahwa pemerintah hadir bukan untuk menjadikan masalah itu menjadi buruk akan tetapi pemerintah hadir sebagai solusi dalam menyelesaikan kendala itu.

#### **4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)**

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan

memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Struktur birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan public. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*, karena ingin menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebagian besar informan mengatakan bahwa pola kemitraan antar Pemerintah belum berjalan, dikarenakan belum menjalankan fungsinya masing-masing, misalnya Pemerintah belum memfasilitasi sarana pembangunan talud, langkah- langkah yang harus dilakukan, sedangkan masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan.

#### **Penutup**

##### **Kesimpulan**

1. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan atau public dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebagian besar informan mengemukakan pendapatnya bahwa koordinasi antar pelaksana kebijakan pengembangan Wilayah Pesisir tidak berjalan dengan baik, hal

tersebut terlihat dari adanya keterlambatan dalam musuawaran rencana pembangunan di tahun 2020. Namun karena adanya pandemi Covid-19 maka penganggaran itu tidak dilakukan.

2. komunikasi berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan public untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Dasar kebijakan dalam pembuatan atau perumusan kebijakan ini sangat perlu memperhatikan Undang-undang yang ada maupun aturan dari pemerintah daerah dan tentunya selalu memperhatikan kondisi di daerah atau perairan sendiri yang begitu banyak potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan untuk diproduksi khususnya sektor perikanan serta melihat penduduk yang cenderung lebih banyak masyarakat nelayan. Selain itu tolak ukur yang dilihat dalam perumusan kebijakan ini adalah agar masyarakat bisa terlindungi dari abrasi dan diberdayakan dengan baik. Hal ini terlihat. Pembuatan kebijakan itu pula tidak terlepas dari acuan misi dari Pemerintah Daerah. Tetapi terlepas dari hal itu, tentunya setiap hal ingin disempurnakan pastinya mempunyai titik kendala tetapi kembali pemerintah itu sendiri bagaimana bertindak dalam mengatasi kendala tersebut.
3. Disposisi, berkenaan dengan *kesediaan* dari para implementor untuk *carry out* kebijakan public tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Dari segi pembangun talud menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan ada saja

kendala yang terjadi dalam pengimplementasiannya seperti terjadinya pembuatan talud. Hal ini dapat dilihat ketika ada masyarakat yang terjadi kesalahpahaman antara pemerintah terkait baik dari pembangunan talud selaku pelaksana maupun dari masyarakat itu sendiri yang dapat menimbulkan konflik yang ringan diantaranya. Namun peran pemerintah sendiri selalu bisa mengatasi kendala-kendala kecil seperti itu. Dalam arti lain bahwa pemerintah hadir bukan untuk menjadikan masalah itu menjadi buruk akan tetapi pemerintah hadir sebagai solusi dalam menyelesaikan kendala itu.

4. Struktur birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan public. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*, karena ingin menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Pola kemitraan antar Pemerintah belum berjalan, dikarenakan belum menjalankan fungsinya masing-masing, misalnya Pemerintah belum memfasilitasi sarana pembangunan talud, langkah-langkah yang harus dilakukan, sedangkan masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan.

#### **Saran**

1. Seharusnya untuk setiap instansi dengan adanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar bisa mengkoordinir secara ketat agar dampak yang diinginkan betul-betul berdampak baik, baik pada masyarakat itu sendiri maupun pada pemerintah selaku pelaksana kebijakan.
2. Sebaiknya bagi pemerintah khususnya pemerintah Kota Ternate



senantiasa lebih memperhatikan fenomena yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal memperhatikan pembangunan talud agar terhindar dari abrasi.

3. Perlunya melakukan simulasi perubahan garis pantai terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan bangunan pengaman pantai, karena tidak semua bangunan pengaman pantai yang sudah dibangun berfungsi seperti yang direncanakan, disamping biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan sangat besar dan dapat melihat dampaknya pada daerah.
4. Pemerintah perlu melakukan kebijakan dalam pemeliharaan dan pemantauan secara berkala terhadap wilayah pesisir yang terdampak abrasi agar bisa dibangun talud penahan ombak.

#### Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2008). *Pengembangan Wilayah: Konsep Dan Teori*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Budiharsono, S. (2009). *Teknik Pengembangan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dahuri Rokhmin, dkk. (2010). *Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Edwards III, George C.( 2015). *Implementing Public Policy*. Jakarta
- Etta Mamang Sangadji (2015), *Metode Penelitian Praktik Dalam Penelitian*, Yogyakarta.
- Hesel Nogi S.Tangkilisan, (2016). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*, Yogyakarta:Y.A.P.
- Jones, Charles O. (2011). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T., (2010) *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Lexy J. Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Leo Agustino.(2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta.
- Miles, B, Mattew & Michael A. Huberman, (2013), *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Michael Q. Patton.( 2013). *Metode Kualitatif* . Yogyakarta: Pustaka Media.
- Nazir, Moh., (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ryaas Rasyid,(2013) *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000.
- Riant Nugroho, (2008), *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Edisi ke-3, Jakarta:Elex Media Komputindo.
- Samodra Wibawa, (2011), *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia.
- Sinambela, LijanPoltak. (2013). *Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Subarsono, AG. (2005), *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, R. (2013). *Pengembangan Wilayah Pesisir*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taliziduhu Ndraha, (2006): *Dimensi-Dimensi Pemerintahan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tangkilisan, HeselNogi. (2009). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Winarno, Budi. (2010). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

**Sumber-Sumber Lain**

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 229 tentang Pemerintahan Daerah.